



# Gencarkan Patroli Satgas di Kelurahan

Jogo Tonggo dan Jogo Wargo Perlu Digerakkan

**JOGJA, Radar Jogja** - Aktivitas masyarakat di kelurahan akan diawasi lebih ketat selama sepekan ke depan. Perangkat wilayah kelurahan dan kemandren, harus intens lakukan pengecekan kondisi warganya. Hal ini dilakukan seiring naiknya status PPKM di DIJ menjadi level 4.

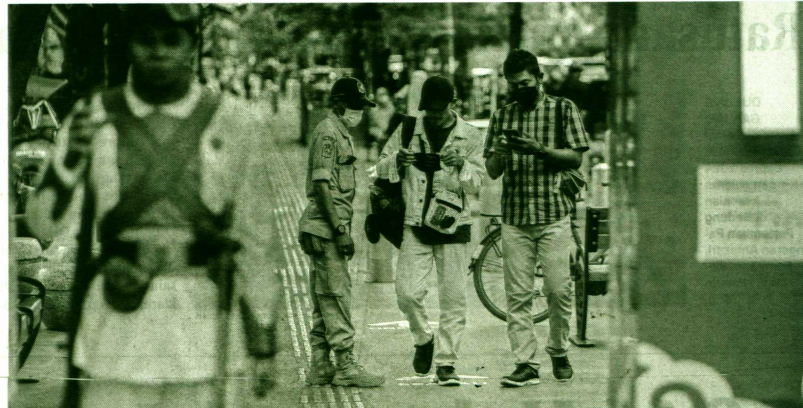
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan, implementasi dari penerapan PPKM level 4 di Kota Jogja utamanya akan memperkuat protokol kesehatan (prokes) di masyarakat. Upaya patroli pengawasan aktivitas di kalangan masyarakat, akan dilakukan oleh satgas Covid-19 kelurahan dan akan diperkuat. "Sekarang memang proses yang kita minta jangan sampai kendur, itu sebenarnya yang kita tekankan," ujarnya saat ditemui di Kompleks Balai Kota kemarin (8/3).

Pada PPKM level 4 ini, masyarakat masih diberi kelonggaran beraktivitas. Hanya kapasitasnya dikurangi agar dapat menghindari penumpukan atau kerumunan masyarakat. "Termasuk acara hajatan, lalu aktivitas yang mengumpulkan banyak massa kita batasi, rata-rata kan hanya bisa (25 persen) saja," jelasnya.

Praktis, seluruh jajaran kelurahan dan kemandren diminta untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi setiap warganya, termasuk pendatang.

Terpisah, Mantri Pamong Praja Kemandren Keraton Sumargandi menjelaskan, giat satgas Covid-19 masih rutin dilakukan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Utamanya melaksanakan penegakan prokes 5M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. "Terutama untuk penggunaan masker, kami selalu ingatkan karena sudah mulai banyak yang abai," katanya kepada *Radar Jogja*.

Dia mengaku, pengawasan prokes di lapangan juga turut diintensifkan seperti pada sektor pelaku usaha resto, warung, tempat-tempat wisata, dan layanan publik



GIAT. Petugas mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker ketika berada di kawasan Malioboro. Sebagai antisipasi terjadinya kerumunan Pemkot Jogja menyiapkan aplikasi Sugeng Rawuh. Penerapan dilakukan pada akhir pekan.

lain. Disamping pengawasan, mencegah potensi kerumunan juga dilakukan. Dengan memantau kegiatan sosial yang mengundang kerumunan di lingkungan masyarakat. "Seperti hajatan kami pantau terus ini, agar tidak menyediakan makan di tempat. Antrean seperti mengisi buku tamu, sesi foto agar tidak menumpuk," bebarnya.

Meski belum mengupayakan selter mandiri bagi warganya yang terpapar Covid-19. Kemandren Keraton memastikan pasien isolasi mandiri (isoman) di wilayah dapat terpantau oleh masing-masing satgas tingkat RT bekerja sama dengan puskesmas, forkompintren, kelurahan. Ini agar warga tetap melaksanakan isoman dengan tertib. Sehingga tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan paparan semakin meluas di wilayah. "Mereka (warga isoman, Red) tetap kami pantau. Warga dan satgas sekitar selalu kami himbau untuk bisa mengingatkan," ungkapnya.

Sejauh ini, total pasien isoman di kemandren Keraton berjumlah 125 orang.

Jumlah itu terdiri dari tiga kelurahan. Terbanyak warga isoman adalah kelurahan Kadipaten berjumlah 46 orang. Disusul kelurahan Panembahan 44 orang, dan kelurahan Patehan 35 orang. "Kebanyakan mereka tanpa bergejala, sehingga cukup dilakukan isoman," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman Harda Kiswaya mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengajak partisipatif masyarakat untuk menggerakkan kembali budaya kearifan lokal. Dengan *jogo tonggo* (jaga tetangga) dan *jogo wargo* (jaga warga).

Konsep ini sebelumnya pernah dilakukan gotong royong untuk selalu mengingatkan prokes di tengah masyarakat. Sekaligus mengencarkan sosialisasi prokes dalam berbagai even kearifan lokal. "Dengan begitu, kedisiplinan terhadap prokes di lingkungan masyarakat tetap terjaga," ucapnya.

Menurutnya, kewajiban pendisiplinan dan ketaatan prokes bukan hanya tugas pemerintah. Melainkan dari kesadaran dan dorongan lingkungan sekitar. Mi-

salnya bila hendak menggelar hajatan, semua harus berdasarkan izin satgas Covid-19 wilayah setempat dan taat terhadap persyaratan prokes.

Sementara Warga Sariharjo, Ngaglik sekaligus Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba menilai penanganan Covid-19 dengan sistem kearifan lokal menurutnya perlu dievaluasi. Mengacu pada pengalaman 2020, cara ini cenderung mengundang kerumunan dan dinilai memberatkan warga. Lantaran warga harus mengeluarkan biaya sebagai sistem *support* penangan Covid-19. "Sementara itu kemampuan ekonomi setiap orang berbeda," sebutnya.

Demikian juga sistem *jogo wargo*. Kegiatan pengawasan prokes harus terus dilaksanakan layaknya ronda malam. Bila ini dipaksakan, akan mengganggu dari sisi kesehatan. Karena harus berhadapan menjaga warga agar taat prokes. "Kecuali pemerintah melakukan *support* penuh, dari sisi anggaran" bebarnya. (*wia/mel/eno/er*)

*Radar hal 1*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005